

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

India menjadi negara ke-2 dengan populasi terbanyak di dunia saat ini, namun di tahun 2023 menurut *United Nations population division*, India akan melampaui China sebagai negara terpadat di dunia. India telah lama disebut sebagai "Negeri Wanita Hilang". Mengacu pada jutaan anak perempuan yang dibunuh sebelum atau sesudah lahir karena masyarakat menstigmatisasi melahirkan anak perempuan.¹ Menurut United Nations Population Fund (UNFP) India merupakan salah satu negara dengan rasio jenis kelamin terendah di dunia, dengan hanya 933 perempuan per 1.000 laki-laki. Ketidakseimbangan ini sering kali disebabkan oleh praktik seperti pemilihan jenis kelamin janin secara selektif (seringkali menggunakan teknologi medis seperti USG), yang berujung pada terminasi kehamilan yang melibatkan janin perempuan. Ini disebut "aborsi selektif berdasarkan jenis kelamin".² Perempuan hilang di India berkisar antara 1,4 juta dan 2,4 juta per tahun dengan rata-rata 2 juta per tahun. Dari semua wanita yang hilang, anak perempuan yang hilang saat lahir rata-rata 0,3 juta per tahun di India (17% dari total). Tingkat kematian wanita di India lebih tinggi dibandingkan dengan Cina, sehingga tingkat kematian berlebih wanita secara signifikan lebih tinggi daripada di Cina selama periode yang ditinjau. Misalnya, pada tahun 1950-an, kematian perempuan rata-rata sekitar satu juta di Cina, dibandingkan dengan 1,5 juta di India. Untuk periode terbaru, 2015-2020, ada sekitar 1,9 juta wanita hilang di India. Ini mendorong perang melawan aborsi berbasis gender, janin perempuan, dan penelantaran anak perempuan dan perempuan, yang sangat berdampak pada populasi perempuan (Datt et al, 2022).

Di India, wanita selalu dipandang sebagai milik laki-laki, hanya laki-laki yang dianggap bijak, sedangkan perempuan tidak. Hal ini masih lazim di India, dimana perempuan tidak diperbolehkan untuk membuat identitas mereka sendiri. Mereka hanya diakui sebagai istri atau sebagai sumber keturunan. Dalam hal kesetaraan gender, di India hirarki laki-laki dalam keluarga cukup kuat, dan struktur keluarga itu sendiri berfungsi untuk menegakkan

¹ <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-59428011>

² From bias to balance: India's journey towards equal sex ratio at birth
<https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/scientificallly-trended/from-bias-to-balance-indias-journey-towards-equal-sex-ratio-at-birth/>

dominasi laki-laki untuk mengontrol kebebasan anggota keluarga lainnya (perempuan). Keputusan hidup perempuan dipengaruhi oleh laki-laki yang menduduki posisi sebagai pemimpin keluarga. Ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan perusakan norma ini bisa menyebabkan kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan berbasis gender (Tirtoputri, 2022). Perempuan yang lahir di masyarakat kasta rendah dianggap rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena jenis kelamin dan kastanya. Mereka menghadapi tingkat kekerasan yang lebih tinggi, terutama di daerah pedesaan Hindu kasta atas (Kumar, 2021).

Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan menjadi target SDG yang harus dicapai pada tahun 2030. Dengan waktu kurang dari 10 tahun dunia tidak berada di jalur yang tepat. Di tengah persilangan krisis COVID-19, krisis iklim, dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan politik, kemajuan kesetaraan gender tidak hanya gagal, tetapi juga mulai mundur.³ SDG atau Sustainable Development Goals itu sendiri merupakan Agenda 2030 atau Tujuan Global, yang mencakup seperangkat 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Tidak lagi cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada masyarakat yang lebih adil dan setara, serta bumi yang lebih aman dan sejahtera. Pemerintah diharapkan untuk mengambil peran dan membuat kerangka kerja nasional untuk mencapai 17 tujuan (Janoušková, Hák, & Moldan, 2018). Selain menjadi salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kesetaraan dan pemberdayaan perempuan merupakan komponen kunci dari semua aspek pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Intinya, pencapaian Tujuan 5 berpengaruh untuk semua SDGs. Pencapaian MDGs (Millennium Development Goals) terdahulu menjadi bukti ini. Karena sebagian besar indikator MDGs terkait dengan kesetaraan gender, diakui bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terus berlanjut selama 15 tahun keberadaan MDGs, telah menghambat kemajuan target dan tujuan MDGs lainnya (Munasaroh, 2022).

³ *In focus: Sustainable Development Goal 5 Achieving gender equality and empowering all women and girls.* Retrieved from UN WOMEN : <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/08/in-focus-sustainable-development-goal-5> diakses pada 20 Desember 2022 pukul 22.14 WIB

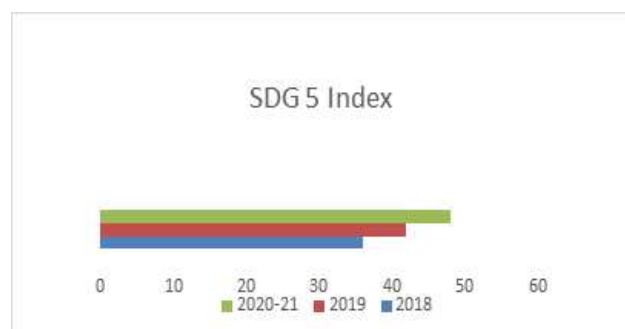
Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia dengan begitu semua perempuan dan anak perempuan harus memiliki kebebasan dan kualitas hidup yang sama dengan laki-laki. SDG menetapkan prioritas tinggi dan menyerukan penghapusan "segala jenis kekerasan di mana pun". Dengan mengidentifikasi faktor sosial dan politik yang memungkinkan kesetaraan gender, demi mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Dengan begitu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengakui dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan khususnya terhadap kesejahteraan perempuan dan agenda pembangunan secara umum, dan secara implisit mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dapat dicegah (Babu & Kusuma, 2016). Target **5.1**, **5.2** dan indikator **5.1.1**, **5.2.1** SDG 5 ini mengenai segala bentuk diskriminasi termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang harus dihapuskan. Perempuan berhak mendapatkan hidup bebas dan ruang yang aman baik itu di publik maupun domestik. Memberantas ketidaksetaraan gender sangat penting untuk kemajuan pembangunan manusia.

SDGs telah diadopsi sebagai dasar bagi rencana pembangunan dan strategi politik negara anggota PBB selama 15 tahun ke depan, dari 2016 hingga 2030. Agar SDGs dapat terwujud, setiap negara anggota PBB wajib mengadopsi ini. India adalah salah satu negara yang berkomitmen dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa India menunjukkan komitmennya yang mendalam untuk menjaga keharmonisan global, meningkatkan kesetaraan sosial-ekonomi dan menjaga keseimbangan alam dibarengi dengan mendukung penuh agenda PBB. Tim Negara PBB di India juga mendukung NITI Aayog, kementerian Persatuan dan pemerintah negara bagian dalam upaya mereka untuk mengatasi keterkaitan tujuan-tujuan, untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dan untuk mengadvokasi pembiayaan yang memadai untuk mencapai SDG.

Salah satu tujuan India untuk tahun 2030 adalah memberdayakan semua perempuan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, berkontribusi sebagai mitra yang setara dalam pertumbuhan dan pembangunan negara, dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah melaksanakan berbagai skema/program untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan melalui pengarusutamaan gender, meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan memfasilitasi dukungan kelembagaan dan legislatif. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dan tujuan keadilan gender tertanam dalam Konstitusi India dan diupayakan

untuk diaktualisasikan melalui berbagai undang-undang, kebijakan, program, dan inisiatif pemerintah khusus. One Stop Centers (OSC) didirikan di seluruh negeri untuk memfasilitasi akses ke berbagai layanan terpadu, termasuk dukungan polisi, medis, hukum, psikologis dan penampungan sementara bagi perempuan yang terkena dampak kekerasan (NITI Aayog SDG Index, 2019:71).

Dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara menyeluruh, India tidak menunjukkan banyak kemajuan dalam kesetaraan gender SDG (Tujuan 5). Meskipun India masuk ke dalam kategori 'Front Runner' dengan skor keseluruhan 17 tujuan, 66 (dari 100) pada report tahun 2020-2021, tetapi kinerjanya dalam tujuan 5 tetap berada di kategori 'Aspirant', yaitu tingkat terendah. Laporan NITI Aayog mengklaim bahwa India bahkan tidak mendekati setengah dari tujuan yang ditetapkan dalam tujuan PBB untuk kesetaraan gender.⁴ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh NITI Aayog SDG Report tahun 2018 hingga 2021, nilai index pencapaian tujuan 5 dari tahun ke tahun sangat rendah, yakni untuk tahun 2018 hanya memperoleh 39 poin, pada tahun 2019 hanya ada peningkatan 3 poin menjadi 42, dan pada tahun 2020-2021 juga masih memperoleh poin yang rendah yaitu 48.



Source : NITI Aayog SDG Report

Meskipun ada peningkatan pada tahun 2020 sampai 2021 yaitu 48 poin, diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu tantangan besar yang belum dapat diselesaikan oleh India. Terbukti dengan melonjaknya kasus pada saat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pemerintah India mencatat 77 kasus perkosaan setiap hari, dengan total pada tahun 2021 mencapai lebih dari 28.000 kasus. Itu terjadi selama satu tahun di mana

⁴ India's Failure in Implementing the Gender Equality SDG <https://delhipostnews.com/indias-failure-in-implementing-the-gender-equality-sdg/>

sebagian besar negara berada di bawah penguncian nasional yang diamanatkan.⁵ Menurut laporan UN Women ketika lockdown COVID-19 diberlakukan, ini menjebak perempuan di rumah dengan pelakunya, tingkat kekerasan dalam rumah tangga pun melonjak. Di India, laporan kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, kekerasan dunia maya, dan perdagangan perempuan dan anak perempuan meningkat dalam beberapa bulan pertama pandemi. India mencatat peningkatan kekerasan dalam rumah tangga sebesar 2,5 kali lipat antara Februari dan Mei 2020.⁶ Kekerasan struktural dan kultural terhadap perempuan di India menjadi salah satu masalah utama yang perlu diatasi oleh pemerintah India sampai saat ini. National Crime Records Bureau (NCRB) India mencatat 428.278 dari enam juta pelanggaran yang dilaporkan polisi India antara 1 Januari dan 31 Desember 2021, melibatkan kejahatan terhadap perempuan. Dari 338.954 kasus pada tahun 2016, terjadi peningkatan sebesar 26,35%. Kejahatan terhadap perempuan yang dimaksud yaitu pemerkosaan, pembunuhan mahar (*dowry deaths*), kekerasan dalam rumah tangga dan *sex trafficking*.⁷

Tanpa reformasi sosial yang signifikan, India tampaknya tidak akan mampu mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030, karena pada umumnya tidak mencapai target nasionalnya sendiri dalam hal ini. Diskriminasi sudah dimulai sejak lahir, ketika praktik seperti aborsi berdasarkan jenis kelamin dan pembunuhan bayi membantu menciptakan ketidaksetaraan rasio jenis kelamin. Tidak berhenti di situ, kasus kekerasan terhadap perempuan India masih berlanjut dan kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik (Bajpai & Biberman, 2020). Partisipasi dan representasi politik perempuan India tetap rendah. India memiliki target nasional 50 persen kursi yang masing-masing dipegang oleh laki-laki dan perempuan. Namun, belum ada beberapa wilayah yang mencapai target ini (NITI Aayog SDG Index, 2018:65).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang Masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

⁵ Aljazeera, 2021. "What will it take to end gender-based violence in India?", [Daring] Aljazeera News. Tersedia dalam [https://www.aljazeera.com/program/upfront/2021/12/24/what-will-it-take-to-end-gender-based-violence-in-india]

⁶ UN Women 2021. "Women and Covid-19 in India", Tersedia dalam https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/7/faq-women-and-covid-19-in-india

⁷ *Rising crimes against Indian women in five charts*. Retrieved from BBC : https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62830634

“Apa faktor-faktor kegagalan komitmen India dalam mencapai Tujuan ke-5 SDG untuk menjamin keamanan perempuan?”

1.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dasar dengan menggunakan pendekatan feminisme radikal dan konsep SDGs.

1.2.1 Feminisme Radikal

Secara umum, feminisme dapat dilihat sebagai gerakan untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi dan penindasan seksis serta mencapai kesetaraan gender secara penuh dalam hukum dan praktik. Perempuan disubordinasi oleh laki-laki, dan feminisme adalah aliran pemikiran yang mengakui fakta ini dan berusaha mengatasinya. Prinsip sentral feminisme adalah bahwa peran gender adalah konstruksi sosial dan bukan sesuatu yang alami, dan dengan demikian prinsipnya dapat diubah. Ini terutama menyangkut posisi perempuan dan pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Azizah, 2017, hlm. 7).

Karena individu tertentu terpinggirkan dan mengalami ketidakamanan yang serius di dalam negara berdaulat, feminisme sebagai teori kritis dalam hubungan internasional mempertanyakan peran negara. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi relasi kuasa yang terkonsentrasi dalam tradisi patriarki dalam berbagai aspek eksistensi manusia, pemaknaan peran gender menjadi sangat penting sebagai lensa analisis feminis. Di dalam teori feminisme itu sendiri terdapat beberapa aliran, masing-masing mempunyai sudut pandangnya tersendiri tentang masalah sosial dan politik. Salah satunya yaitu aliran feminisme radikal, yang beranggapan bahwa negara patriarki menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penindasan terhadap perempuan. Feminisme radikal melihat bahwa dalam masyarakat terdapat sistem penindasan dimana orang-orang tertentu mendominasi orang lain, seperti penindasan antara jenis kelamin, kelas/kasta, etnis ras dan agama (Duerismith & Meger, 2020). Patriarki adalah sistem struktur dan institusi yang diciptakan oleh laki-laki untuk mempertahankan dan menciptakan kekuasaan laki-laki dan subordinasi perempuan. Struktur tersebut meliputi: institusi seperti hukum, agama, dan keluarga; ideologi-ideologi yang melanggengkan posisi inferior perempuan yang “secara alamiah”. Kekuasaan laki-laki dipertahankan dan ditentukan melalui berbagai cara, oleh institusi sosial, oleh ideologi, oleh pemaksaan atau kekerasan, oleh kontrol atas sumber daya dan oleh kekuasaan pribadi (Rowland & Klein, 1996).

Kerangka teoritis feminisme radikal menekankan tiga konsep penting yang saling berkaitan, yaitu patriarki, kekuasaan dan penindasan. Feminis radikal berpendapat bahwa jika sistem patriarki yang mengontrol dan menindas dapat ditumbangkan, maka perempuan dapat

memerdekakan diri (Djara, 2020). Selain itu, feminis radikal fokus pada kekerasan laki-laki terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, dan menekankan bahwa tidak mungkin menghadapi dan memerangi ketidaksetaraan gender tanpa mengatasi kekerasan tersebut. Feminisme radikal melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk kekuasaan dan kontrol laki-laki dalam masyarakat patriarki. Kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan, sering kali digunakan untuk mempertahankan dominasi laki-laki dan menakut-nakuti perempuan agar tunduk (Grosser dan Tyler, 2021).

Feminisme radikal kemudian menekankan bahwa dominasi laki-laki ada di semua bidang, seperti politik, agama, dan seksualitas. Akibat patriarki, penindasan gender laki-laki telah menjadikan perempuan ter subordinasi dalam struktur ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Laki-laki dianggap mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Di semua lapisan masyarakat, memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Budaya patriarki ini secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang pada akhirnya menjadi hierarki gender. Ketika hak-hak perempuan atas kesetaraan peran dalam keluarga dan masyarakat tidak terjamin, maka akan terjadi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki (Situmorang & Susanti, 2022). Penindasan terhadap perempuan adalah bentuk perlawanan politik yang sangat mendasar dimana perempuan dimasukkan sebagai kelas seks yang lebih rendah. Feminisme radikal berusaha menghapuskan sistem kelas ini. Penindasan terhadap perempuan diwujudkan dalam hubungan sosial seperti yang terjadi dalam kehidupan domestik (Azizah, 2017, hlm. 27).

1.2.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan ditetapkan oleh majelis umum PBB pada tahun 2015. Sidang Umum ini diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, dihadiri oleh 193 negara, termasuk perwakilan dari India. SDGs adalah tujuan dunia yang didasarkan pada Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) sebelumnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini dan meningkatkan kehidupan semua orang, melawan ketidaksetaraan dan meningkatkan kapasitas produktif bangsa, meningkatkan inklusi sosial dan mengubah iklim serta melindungi lingkungan untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal sampai 2030 mendatang. Dari 17 tujuan ini mencakup 4 pilar yakni, pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pencapaian kesetaraan gender dalam Tujuan 5 ini termasuk kedalam tujuan pembangunan manusia yaitu pilar sosial (Munasaroh 2022). Meskipun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak mengikat

secara hukum, pemerintah diharapkan bertanggung jawab dan menciptakan kerangka kerja nasional untuk mencapai 17 tujuan tersebut. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan menuju tujuan, yang memerlukan pengumpulan data berkualitas tinggi, dapat diakses, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi regional didasarkan pada analisis tingkat nasional dan berkontribusi pada pemantauan dan evaluasi global.⁸

Kementerian pusat dan pemerintah daerah India bekerjasama dengan NITI Aayog, untuk mengawasi perkembangan SDG dan mengukur kinerja pemerintah nasional (tiga puluh enam negara bagian dan federal) untuk mencapai dan melokalisasi SDG. Kinerja dihitung dan ditampilkan sebagai jarak yang ditempuh menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan berbagai indikator SDG yang menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. India mengadopsi 62 indikator penting dan 9 diantaranya ada pada tujuan 5:

1. Tingkat kejahatan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan, target yang harus dipenuhi sebesar 0 persen. Target ini selaras dengan target global SDG 5.2 yang bertujuan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat.
2. Rasio jenis kelamin saat lahir, memiliki nilai target 950, Laporan UNFPA 2019 tentang “Rasio Jenis Kelahiran di India: Tren dan pola terkini” mengamati bahwa dengan tidak adanya pemilihan jenis kelamin, Rasio Jenis Kelahiran (SRB) adalah sekitar 105 kelahiran laki-laki per 100 kelahiran perempuan atau sekitar 950 kelahiran perempuan per 1.000 kelahiran laki-laki.
3. Rasio pendapatan upah/gaji rata-rata perempuan terhadap laki-laki yang diterima di antara pegawai berupah/bergaji tetap, memiliki target rasio 1 perbandingan laki-laki dan perempuan.
4. Per 1,00,000 wanita yang pernah mengalami kekejaman/kekerasan fisik oleh suami atau kerabatnya selama setahun, target nasional yang harus diturunkan sebesar 0 persen.
5. Persentase perempuan terpilih atas total kursi di dewan legislatif negara bagian, dengan memiliki target 50 kuota yang harus dipenuhi.
6. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terhadap laki-laki (15-59 tahun), dengan nilai target 1.

⁸ The Sustainable Development Agenda <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda-retired/>

7. Proporsi wanita dalam posisi manajerial termasuk wanita dalam dewan direksi, di perusahaan terbuka (per 1.000 orang), memiliki nilai target 245.
8. Persentase wanita kawin umur 15-49 tahun yang memenuhi permintaan alat KB modern, dengan memiliki nilai target 100 persen.
9. Kepemilikan lahan operasional berdasarkan jenis kelamin (persentase kepemilikan operasional yang dioperasikan perempuan) dengan target nasionalnya yaitu 50.

Meskipun India telah membuat kemajuan dalam beberapa SDG, perlu waktu untuk mencapai target yang diinginkan. Diyakini bahwa India telah melakukan pembangunan dengan sangat baik, namun masih memiliki banyak tantangan dalam hal pengentasan kemiskinan, distribusi pendapatan, pemberdayaan perempuan, emisi gas rumah kaca dan sanitasi (Bajpai & Biberman, 2020).

1.3 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa, factor-faktor kegagalan komitmen India dalam pencapaian SDGs tujuan 5 adalah:

1. Budaya patriarki, kasta, seksisme yang tertanam di Masyarakat sehingga menimbulkan tradisi yang mengarah pada kekerasan
2. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam politik/pengambilan keputusan menjadi alasan sedikitnya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjawab masalah penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif untuk pengumpulan data dengan teknik penelitian kepustakaan. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui penerjemahan ke dalam kalimat dan bahasa dengan menggunakan metode ilmiah. Tulisan ini akan memperoleh data sekunder dan valid yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen akademik lainnya yang berhubungan dengan Ilmu Hubungan Internasional untuk menganalisis kegagalan komitmen India dalam pencapaian SDG 5 untuk menjamin keamanan perempuan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis factor-faktor kegagalan komitmen India dalam pencapaian SDGs tujuan ke-5 pada tahun 2018-2021.

1.6 Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian mengenai Kegagalan Komitmen India Dalam Pencapaian SDGs Tujuan ke-5 Untuk Menjamin Keamanan Perempuan pada periode 2018-2021, dengan berfokus pada target 5.2 (menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat).

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian kedalam empat bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berfikir, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II membahas mengenai bentuk kegagalan komitmen pemerintah dan rendahnya pencapaian pada beberapa target dalam Tujuan 5

Bab III membahas mengenai Faktor Kegagalan Komitmen Pemerintah Merealisasikan SDGs Tujuan 5 terkait Keamanan Perempuan.

Bab IV akan memberikan kesimpulan penelitian beserta penjelasan penelitian secara menyeluruh.